

NOMOR PERJUDIAN

Berita

PEREKONOMIAN

Digitalisasi oleh Penggiat Buku

DITERBITKAN OLEH:
**KEMENTERIAN KEMAKMURAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 6
Tahun I
17 Juli
1948

SARI DARI PRAE-ADVIES R. SOETIJO tentang :

Balai propaganda pertanian dan Desa Baru.

Guna menerangkan tudjuan Balai Propaganda Pertanian dan Desa Baru oleh prae-adviseur terlebih dahulu dengan singkat dibitjarakan berturut-turut.

I. Tudjuan dan akibat politik Ekonomi Pemerintah Belanda;

dan mungkin dengan kepandaian jang lebih tinggi djuga. Jang demikian itu tidak sukar didjalankan kiranja, berhubung sedjak Negara kita Merdeka hasrat untuk menuntut pelajaran disekolah² menengah dan perguruan Tinggi dari masjarakat tani mulai nampak dengan njata.

Djika dikatakan banjak sekali kader jang dibutuhkan, itu bukan mengandjurkan supaya pendidikan kader² diselenggarakan sekali gus untuk semua desa jang membutuhkan dalam kabupaten. Pendidikan jang diberikan kepada orang terlalu banjak bersama² umum nja tidak dapat mendalam, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Oleh karenanja diusulkan, supaya dalam satu angkatan pendidikan diambilnja tidak lebih dari 40 orang tjalon kader. Djika untuk keperluan tersebut dapat disediakan asrama, nistjaja lebih pula hasil jang dapat diharap.

2. Alat-alat pendidikan.

Ini tergantung dari matjamnja pendidikan, jang akan diselenggarakan; dapat dibuat sederhana sekali, dapat dibuat sempurna, sehingga minta beaja jang luar biasa banjaknja.

Djuga didalam menjelenggarakan alat² pendidikan kepada masjarakat tani didesa² diharap, supaya desa jang berkepentingan turut merasa bertanggung djawab atas djelek dan baiknja hasil pendidikan.

Ruangan untuk berkumpul, untuk taman batjaan, untuk mengadakan consultatie, menjimpan bibit pilihan dan sebagainya — djika datang waktunya harus desa jang menjeleggarakan, djika perlu dengan bantuan Pemerintah. Begitu pula kebun bibit, kambing bibit dan lembu pematjak.

Kebun tjonto dan kebun pertjobaanpun djika dianggap perlu baik diselenggarakan oleh desa jang berkepentingan, bersama² dengan Djawatan Pemerintah jang bersangkutan.

II. Tudjuan dan pokok dasar Ekonomi Negara Republik Indonesia;

III. Tudjuan dan tjara bekerdja dari Djawatan Pertanian Rakjat;

IV. Pembangunan masjarakat desa;

V. Tudjuan B. P. P. dan desa Baru.

I. Tudjuan dan akibat politik Ekonomi Pemerintah djadjahan.

Pada djaman V. O. C. terdapat kewadajiban kerdja pertjuma dan pemungutan hasil bumi dengan ditukar atau dibeli dengan harga murah jang tidak sepadan („verplichte diensten en contingenten”). Tidak sadja aturan ini memadamkan iniatif petani, melainkan banjak djuga petani² meninggalkan desanja untuk pindah kelain

Selain dari itu banjak pula alat² pendidikan, jang sukar atau tidak mungkin diusahakan oleh desa², atau daerah² jang ketjil, misalnja : alat² pendidikan dengan radio, dengan bioskoop, tentoonstelling dan lain², begitu djuga pengarang buku² pelajaran dan batjaan, madjallah² dan lain² siaran. Alat² ini hendaknja diusahakan oleh pusat di Karesidenan, Propinsi atau Negeri. Demikian alat² pendidikan dapat disempurnakan, sedang tenaga dan beaja dapat dihemat. Djika dalam pusat itu sungguh² ada kerdja sama jang erat antara rupa² Djawatan dan badan² maupun ahli² lainnja, nistjaja pendidikan masjarakat tani akan mendjadi sempurna, sehingga hasilnyaapun bagus djuga.

3. Beaja pendidikan.

Terang bahwa beaja jang diperlukan untuk pendidikan masjarakat tani akan besar djumlahnja. Di Amerika, Eropah, Hindia, Djepang, Birma d.l.l. pendidikan masjarakat setjara tersebut sebagian besar dibeajai oleh penduduk sendiri, karena mereka mengerti bahwa pendidikan membawa bahagia dan kemakmuran.

Mudah-mudahan rakjat di Indonesiapun dapat diinsjafkan, bahwa pendidikan masjarakat tani adalah suatu kepentingan nasional, jang tidak melulu mendjadi kewadajiban Pemerintah sadja.

Achirulkalam diperingatkan dengan keras, bahwa masjarakat tani sudah menunggununggu didikan, jang didjandjikan oleh U.U. D. Negara kita.

tempat, karena tidak tahan tekanan jang dideritannya.

Peraturan V. O. C. tersebut oleh Raffles dalam teori dihapuskan dan oleh Van den Bosch diganti dengan „Cultuurstelsel” jang tidak perlu diuraikan lebih lanjut karena tjukup dikenal. Akibat daripada kerdja paksa ini, ialah bahwa petani kehilangan kemerdekaannya terhadap tanahnya, kemauan untuk bekerdja padam, para petani djuga kehilangan kepertjajaan terhadap diri sendiri, lebih banyak lagi dari mereka jang meninggalkan desanya dan halaman pekarangannya untuk menghindarkan penderitaan jang amat berat itu. Akibat lain ialah bahwa struktur desa, jang mula2 agak demokratis itu mendjadi rusak sama sekali.

Belanda sendiri mengaku buruknya „Cultuurstelsel” dengan menamakannya „halaman hitam” dalam sedjarahnja, meskipun ia menerangkan bahwa bukan stelselnja jang buruk, melainkan jang mendjalankan, jaitu terutama „de knevelende inlandsche hoofden” (pemimpin2 inlander jang corrupt).

Bagaimanapun djuga reaksi di negeri Belanda sendiri, berakibat merobah politik agraria Pemerintah Hindia Belanda dengan keluarnya Agrarische Wet 1870, jang memungkinkan orang partikelir mendapat tanah erfpacht untuk mendirikan perusahaan. Modal Asing, terutama modal Belanda mengalir ke Indonesia dan terutama modal jang dipergunakan untuk perusahaan pertanian jang sangat mentjampuri perekonomian desa (seperti mengenai urusan penjawaan tanah, pengairan, djenis tanaman berhubungan dengan waktu penjerahan tanah kepada pabrik, urusan tenaga pekerdja, jang diambilnja dari masyarakat tani) menimbulkan pertanyaan2 antara modal jang bekerdja di tanah air kita dengan alat2 jang modern, technici jang pandai, tjara jang efektif dan rasionil terdorong oleh tjita2 laba sebesar-besarnya dengan tidak memperhatikan kesejahteraan rakjat dan masyarakat tani jang mempunyai tjara dan pandangan hidup lain.

Segala usaha pada djaman pendjadjahan Belanda, mulai dari V. O. C. — „Cultuurstelsel” sampai djaman Agrarische Wet 1870 mempunyai satu tjorak, jaitu tjorak drainage atau pengurusan. Hasil Indonesia berupa bahan2 export mengalir ke Negeri Belanda hingga berdjuta-djuta rupiah djumlahnja

memberi kekajaan Negeri Belanda dan kaum modalnja, sedang rakjat Indonesia ditinggalkan miskin, supaja tenaga pekerdja jang dibutuhkan oleh perusahaan2 tadi tetap murah dan mudah didapatnja, sehingga keuntungan bagikaum modal Belanda tetap besar.

„Lapar-politik” ini menimbulkan begitu kemelaratan hingga Madjelis Rendah Belanda merasa perlu mengadakan „Mindere Welvaart Commissie (th. 1902). Akibat daripada penjelidikan ini dan terdorong oleh kepentingan sendiri karena pada waktu itu djuga mulai timbul gerakan nasional, timbulah aliran „ethische politiek” dan tumbuhlah djawatan2 kemakmuran („welvaart-diensten”) a.i. djuga Landbouw Voorlichtingsdienst.

Akan tetapi karena politiknja pemerintah djadjahan tidak berobah, djawatan2 tadi sebagai alatnja tidak dapat merobah keadaan sehingga pada tahun 1927 Dr. J. H. Boeke dalam madjallah „Koloniale Studien” mengatakan bahwa politik kemakmuran jang telah bertahun-tahun didjalankan tidak menambah kemakmuran bangsa Indonesia, sebaliknya jang tambah ialah padatnja penduduk, hal mana hanya menguntungkan kaum pengusaha asing (belanda), sehingga kalau politik ini tidak dirobah Rakjat Indonesia akan didorong semuanya untuk mendjadi kuli, jang dengan pekerdjaannya hanya tjukup mendapat sekedar sepintjuk nasi.

II. Tujuan dan pokok dasar ekonomi Negara Republik Indonesia,

Disini prae-adviseur hanya mensitir pokok2 dari prae-advies lain jaitu:

„Dasar politik perekonomian Indonesia ialah memenuhi keperluan hidup rakjat seluruhnja, supaja rakjat Indonesia mendjadi rakjat jang makmur, djasmani dan rohani. Tenaga produksi masyarakat harus diatur dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan barang2 keperluan hidup rakjat itu. Apa jang ta' dapat dihasilkan sendiri, harus didatangkan dari luar negeri. Djadi import adalah sambungan jang tidak dari pada produksi nasional. Baru sesudah itu datang export untuk membajar import itu.

„Bukanlah export-ekonomi” jang harus diutamakan seperti politik perekonomian Hindia Belanda dahulu, melainkan: menimbulkan tenaga pembeli rakjat jang sebesar-besarnya”.

Teranglah perbedaan besar dari pada tudjuan dan pokok dasar ékonomi Hindia Belanda dan dari Negara Republik Indonesia.

III. Tudjuan dan tjara bekerdja djawatan Pertanian Rakjat.

Karena perbedaan tudjuan dan pokok dasar ekonomi dari Hindia Belanda dan dari Negara Republik Indonesia dengan sendirinja sebagai alatnja pemerintahan masing-masing L.V.D. dan Djawatan Pertanian Rakjat mempunyai tudjuan dan tjara bekerdja berlainan.

1. titik berat dari pada pekerdjaan diletakkan oleh: L.V.D. kepada perusahaan orang tani, dan lebih memperhatikan tehnik.

D.P.R. kepada orang taninja, lebih memperhatikan djiwa tani, orang tani sebagai anggota masyarakat.

2. Penerangan:

L.V.D. bersifat perseorangan (individu) dan umumnja bersikap dingin terhadap organisasi Rakjat, organisasi jg. berbaur politik ditolaknja;

D.P.R. bersifat massaal, oleh karena jang akan diperbaiki masyarakat jang berdasar gotong-rojong, menghidupkan „orgaanvorming” untuk bekerdja bersama sebagai sjarat mutlak, turut menjusun masyarakat jang hidup dan beridologi menurut tjita-tjita Negara.

IV. Pembangunan masyarakat desa.

Telah digambarkan apa akibat dari pada „lapar-politik” jang didjalankan oleh Belanda. Oleh Djepang politik ini diganti dengan „bajonet-politik”. Dengan sendirinja Pemerintah kita jang berdasar Pantja-Sila tidak dapat mempergunakan kedua politik tersebut. Kita harus membangun Negara kita kembali dan dalam pembangunan ini diambilnja desa sebagai pokok pangkalan, karena desa di Indonesia merupakan suatu kesatuan kuat tumbuh dari sedjarah, dan masih sangat mempengaruhi sepak terdjang dan tjara hidup Rakjat tani, walaupun lebih kurang dari dulu.

Desa ini perlu diperbaharui, tidak rumah-rumahnja atau pagarnja, melainkan djiwa

orang2nja, sehingga didalam desa tumbuhlah djiwa baru jang hidup, jang dynamis-jang selalu mengikuti perubahan djaman sehingga desa dapat disebut „old but over new”.

V. Tudjuan B.P.P. dan desa Baru.

Apa jang diuraikan sebagai tudjuan B.P.P. dan Desa Baru dalam konperensi Djawatan Pertanian di Madiun bagian besar telah dimuat di „Berita Perekonomian” No. 3 — 4 dalam karangan: Pendjelasan tentang B.P.P. dan Desa Baru oleh Sdr. Soetijo djuga.

Tinggallah kesimpulannja prae-adviseur jang dibawah ini dimuat dengan lengkapnja

Kesimpulan:

Politiek Export-Ekonomi Pemerintah Belanda jg. mengabaikan kepentingan Rakjat jang dimulai dengan V.O.C. disusul oleh Cultuur-stelsel kemudian dilandjutkan dengan perusahaan kapital asing setjara besar-besaran dengan alat jang modern (hoogkapitalisme) mengakibatkan terdesaknja kaum tanidan menghalang berkembangnja initiatief orang tani jang merupakan masyarakat agraria, kedjurusan buruh dan petaniketjil jang tidak mempunyai hubungan dengan luar negeri.

Tudjuan Ekonomi Pemerintah Negara Republik Indonesia memutar haluan diatas 180 % dan mementingkan kebutuhan Rakjat sebagai pedoman. Hal ini menghendaki perobahan masyarakat jang radicaal jang harus dibangun dulu. Dalam mengadakan perobahan dan menjelenggarakan pembangunan Negara, Rakjat harus dididik dan dibimbing. Dalam pendidikan ini initiatief dan auto-activiteitnja harus dihidupkan. Dalam menjelenggarakan pendidikan Rakjat ini Djawatan Pertanian Rakjat dari Kementerian Kemakmuran turut mengambil bagian mendidik kaum taninja dengan desa sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebagai pokok pangkal permulaan (startingspoint). D.P.R. berkejakinan bahwa pembangunan Negara harus dilakukan dengan merobah djiwa masyarakat desa. Dan oleh karena itu Djawatan Pertanian Rakjat mengambil initiatief menjelenggarakan B.P.P. sebagai tpaus cultuur masyarakat desa.